

KAJIAN PERKEMBANGAN RETRIBUSI PARIWISATA DI KABUPATEN KENDAL

(Kajian Kebijakan Perda nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha)

Oleh:

Yusuf Rajendra, Dr. Kismartini, M.Si
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Levy of the tourism management under the auspices of the Department of Youth Sport and Tourism of Kendal Regency, and its establishment are arranged in Regional Regulation No. 10 of 2011 of Kendal Regency “the levy of service business in Kendal Regency” which is written in Chapter VII pertaining to the levy of the recreation areas and sports that serve as the legal foundation of an area in Kendal Regency in terms of the handling and management of the Tourism Levy. This research aims to ascertain the development of the levy of the tourism sector in managing three tourist attractions, which are Sendang Sekucing Beach, Curug, Sewu, Boja Swimming Pool as well as to understand the issues faced by Tourism Sector in Kendal Regency in managing the levy. This research is a descriptive research that uses the qualitative approach as the method. Based on the existing types of research, it is acknowledged that there are several issues in regard to the policy of tourism levy, which cover the financial budget funds, addition of the number of the rides or innovation in tourism management, as well as other factors such as human resource in Kendal Regency, which can be seen from the considerably low quality and quantity. The offered solution comprises the government’s action in improving the infrastructure development in many tourist sites being managed by the local government to adequately maintain and enhance the number of human resource in the work environment, regarding both the quality and quantity of the tourist destinations in Kendal Regency that should be well-organized.

Keywords: Policy, Levy, Tourism.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor lain, karena pariwisata bisa dikatakan sebagai gabungan fenomena dan hubungan timbal balik akibat adanya interaksi dengan wisatawan, supplier bisnis, pemerintah tujuan wisata serta

masyarakat daerah tujuan wisata. Bahkan pariwisata mampu membuat masyarakat setempat mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebutlah yang mengakibatkan dampak akan sebuah pariwisata menjadi studi yang paling sering mendapatkan perhatian masyarakat

karena sifat pariwisata yang dinamis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, maka pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata menjadi hal yang sangat penting.

Peraturan daerah kabupaten Kendal nomor 10 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha di kabupaten Kendal dan termuat pada Bab VII tentang “retribusi tempat rekreasi dan olahraga”. Peraturan tersebut digunakan untuk peningkatan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga kepada masyarakat serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

Pemerintah Kabupaten Kendal mengusulkan kenaikan tarif masuk tiap destinasi wisata yang ada di kabupaten Kendal. Perubahan tarif diusulkan pada peraturan bupati nomor 61 tahun 2015 tentang “perubahan tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga di kabupaten Kendal”. Peraturan ini ditujukan untuk penunjang atau pendukung dalam kontribusi retribusi yang dilakukan oleh sektor pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kendal.

Kabupaten Kendal adalah salah satu daerah yang pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti:

jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun internasional, tingkat hunian hotel, dan tentunya pendapatan perkapita. Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik memilih judul **“Kajian Perkembangan Retribusi Pariwisata di Kabupaten Kendal”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perkembangan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Kendal diukur dengan efektivitas dan efisiensi?
2. Apa saja yang menjadi kendala atau faktor penghambat retribusi pariwisata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)?

C. TUJUAN

1. Menganalisis perkembangan retribusi sektor pariwisata dalam mengelola tiga destinasi wisata yaitu: pantai Sendang Sekucing, Curug Sewu, Kolam Renang Boja.
2. Untuk mengetahui sektor pariwisata di Kabupaten Kendal dalam mengelola retribusi.

D. TEORI

1. Kebijakan Publik

Thomas Dye (Subarsono, 2013: 2) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Definisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan

pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. Berdasarkan beberapa pengertian kebijakan publik diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama atau publik, bukan kehidupan orang seorang atau golongan.

2. Proses Kebijakan Publik

Menurut William Dunn (2007:32-33) proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap penyusunan agenda
Pada tahap ini berbagai masalah akan berkompetisi dahulu agar dapat masuk kedalam agenda kebijakan dimana dimungkinkan ada masalah yang tidak tersentuh sama sekali, sementara masalah lainnya akan menjadi fokus pembahasan, atau ada masalah-masalah tertentu yang akan tertunda dalam waktu yang lama.
- b. Tahap formulasi kegiatan
Pada tahap ini, masalah-masalah didefinisikan lalu dicarikan pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan permasalahan tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada dimana para aktor penentu kebijakan tersebut juga akan ikut dalam menentukan kebijakan yang akan dibuat.
- c. Adopsi kebijakan
Pada tahap ini akan dipilih satu dari banyak kebijakan yang telah ditawarkan oleh perumus kebijakan dan

dilakukan dengan dukungan dari pihak legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

- d. Implementasi kebijakan
Implementasi kebijakan artinya kebijakan yang telah diambil akan dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah. Pada tahap ini kemungkinan yang terjadi adalah ada beberapa kebijakan yang diterima atau dilaksanakan oleh para implementor (pelaksana), ada pula yang tidak mendapat dukungan dari pelaksana sehingga kebijakan yang telah diambil tidak dilaksanakan di lapangan.
- e. Evaluasi kebijakan
Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah yang ada.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai

cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi.

4. Model Implementasi Publik

a. Model George Edward III

Menurut model ini, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berhubungan satu sama lain yaitu:

- 1) **Komunikasi**
Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi.
- 2) **Sumberdaya**
Sumberdaya berkaitan dengan segala yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan kebijakan, terdiri dari staf, informasi dan wewenang.
- 3) **Disposisi**
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik meliputi kejujuran dan komitmen pelaksana.
- 4) **Struktur birokrasi**
Struktur organisasi memiliki yang signifikan terhadap implementasi kebijakan meliputi mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.

5. Evaluasi Kebijakan Publik

Islamy (2000) mengatakan bahwa penelitian (evaluasi) kebijakan adalah merupakan langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Salah satu aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dengan

mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya, yaitu pengesahan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) kebijakan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan.

Evaluasi kebijakan dan dampaknya, yakni mengevaluasi kebijakan itu sendiri serta kandungan programnya. Darinya kita akan memperoleh informasi mengenai manfaat (efek) kebijakan, dampak (outcome) kebijakan, kesesuaian kebijakan/program dengan tujuan yang ingin dicapainya (kesesuaian antara sarana dan tujuan), dll.

6. Indikator Evaluasi

- a. **Efektivitas:** Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai ?
- b. **Efisiensi:** Seberapa banyak usaha yang di perlukan untuk mencapai hasil yang di inginkan?
- c. **Kecukupan:** Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
- d. **Pemerataan:** Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
- e. **Responsivitas:** Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuasi mereka?

f. Ketepatan: Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

7. Retribusi

Retribusi Daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan. retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayaran retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya. Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

E. METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan secara deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

Fokus dari penelitian ini adalah kajian perkembangan retribusi pariwisata di Kabupaten Kendal, mendeskripsikan faktor perkembangan sektor pariwisata dalam efektivitas dan efisiensi serta mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh pariwisata dalam pengelolaan retribusi pariwisata.

Lokus penelitian ini adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan daya tarik wisata Kabupaten Kendal yaitu Sendang Sekucing, Curug Sewu, dan Kolam Renang Boja.

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen harus siap melanjutkan penelitian dengan terjun ke lapangan. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer
Data primer adalah data informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

F. HASIL PENELITIAN

1. Perkembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Kendal

Retribusi Pariwisata merupakan pungutan yang dikenakan kepada setiap pengunjung yang datang ke lokasi tempat rekreasi. Retribusi tempat rekreasi termasuk golongan retribusi jasa usaha, tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi diukur berdasarkan jenis fasilitas, luas, dan waktu pemakaian serta pelayanan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak

sebagaimana dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien, efektif dan berorientasi pada harga pasar. Dari retribusi tersebut nantinya akan digunakan sebagai perbaikan serta penambahan sarana prasarana yang masih kurang memadai di tempat rekreasi tersebut.

Sendang Sekucing

Salah satu pantai yang terdapat di pesisir utara Kabupaten Kendal ialah Pantai Sendang Sikucing. Pantai Sendang Sikucing ini berada didesa Sendang Sekucing, Kecamatan Rowosari. Obyek wisata ini cukup ramai dikunjungi wisatawan lokal, apalagi hari minggu, tidak hanya kaum muda-mudi, tapi juga orang tua, yang tentu saja selain bertujuan refreshing, juga mandi dan berjemur. Kawasan ini memiliki potensi pantai dengan pemandangan laut lepas. Namun sangat disayangkan, salah satu aset Kabupaten Kendal ini sepertinya kurang ditangani dengan baik.

Efektivitas

Capaian target efektivitas retribusi pariwisata di Sendang Sekucing apakah telah memenuhi target yang telah ditentukan. Daya tarik wisata Sendang Sekucing di tahun 2013 target yaitu Rp 189.000.000 realisasi pendapatan Rp.143.735.000 (79,07%). Kemudian ditahun 2014 itu target dinaikan menjadi RP.192.079.000 realisasi pendapatan yang dicapai itu sebesar Rp. 144.815.000(75,39%). Kemudian ditahun 2015 targetnya masih tetap Rp. 192.079.000 realisasi pendapatan yang dicapai itu sebesar 196.250.000 (117,24%). Untuk tahun 2016 target naik

menjadi Rp 241,600,000 realisasi pendapatan yang dicapai yaitu sebesar Rp 275,748,000 (115.44%). Ini adalah capaian retribusi sektor pariwisata untuk daya tarik pantai Sendang Sekucing. Kesimpulan terdapat perkembangan efektivitas, karena pada tahun 2015 dan 2016 lebih baik daripada tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 dan 2014.

Efisiensi

Capaian efisiensi yang ada diwisata Sendang Sekucing. Ditahun 2013 Sendang Sekucing pendapatan Rp. 143.735.000. Sedangkan untuk pengeluaran Rp. 197.608.000 tidak efisien karena pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Kemudian ditahun 2014 pendapatan diwisata Sendang Sekucing Rp. 144.815.000 sedangkan anggaran pengeluaran tidak ada (tidak mendapat anggaran). Untuk tahun 2015 pendapatan wisata Sendang Sekucing Rp. 196.250.000 sedangkan anggaran pengeluaran Rp. 74.174.000 (efisien) karena pengeluaran lebih sedikit dari pada pendapatan yang diperoleh.

Kesimpulan terdapat perkembangan efisiensi karena, pada tahun 2015 capaian efisiensi lebih baik daripada tahun sebelumnya (2013)

Curug Sewu

Obyek Wisata Alam Curug Sewu merupakan salah satu obyek wisata di Kabupaten Kendal yang memiliki lokasi sangat strategis dan mudah dijangkau baik dengan kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan umum. Obyek wisata alam ini berlokasi di Kecamatan Patean yang berjarak sekitar 40 km dari Kota Kendal, dengan melewati Kota Weleri

dan Sukorejo. Sedangkan dari Temanggung dan Wonosobo dapat melewati Parakan - Ngadirejo - Patean – Curug Sewu. Obyek Wisata Alam Curug Sewu merupakan obyek wisata yang cukup dikenal dan sering kali dikunjungi oleh wisatawan serta menjadi andalan utama di sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah. Selain itu, obyek wisata ini juga mempunyai potensi wisata yang cukup besar untuk dikembangkan. Potensi tersebut berupa daya tarik, seperti pemandangan alam yang indah, adanya obyek wisata air terjun, dan hutan wisata. Dengan berbagai obyek dan daya tarik wisata serta fasilitas yang telah disediakan oleh pihak pengelola tersebut menjadikan kawasan wisata ini ramai dikunjungi oleh wisatawan.

Efektivitas

Capaian target efektivitas retribusi pariwisata tahun 2013 target yang ditentukan Rp. 650.000.000 realisasi pendapatan yang dicapai yaitu sebesar Rp. 513.767.000 (79,04%) selanjutnya ditahun 2014 target yang ditentukan sebesar Rp. 650.000.000 dan realisasi pendapatan yang dicapai yaitu sebesar Rp. 595.474.000 (91,61%) kemudian ditahun 2015 target yang ditentukan masih sama yaitu Rp.650.000.000 dan realisasi pendapatan yang dicapai yaitu sebesar Rp.670.626.000 (103,71%) ditahun 2016 target yang ditentukan Rp.807.000.000 dan realisasi pendapatan yang dicapai yaitu sebesar Rp.810.575.000 (100,65%) ini adalah capaian retribusi pariwisata daya tarik wisata Curug Sewu. Kesimpulan perkembangan efektivitas pada tahun 2015 dan 2016

lebih baik daripada capaian efektivitas di tahun 2013 dan 2014.

Efisiensi

Capaian efisiensi yang ada diwisata Curug Sewu. Ditahun 2013 Curug Sewu pendapatannya yaitu Rp. 513.767.000, pengeluaran anggarannya yaitu Rp.249.600.000 (efisien) karena pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Untuk tahun 2014 Curug Sewu pendapatannya yaitu Rp. 595.474.000, pengeluaran anggarannya yaitu Rp. 306.509.000 efisien karena pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Ditahun 2015 pendapatannya yaitu Rp. 670.626.000, pengeluaran anggarannya Rp. 292.188.000 efisien karena pendapatan lebih besar dari pada pengeluaran. Kesimpulan terdapat perkembangan efisiensi karena, pada tahun 2013, 2014 dan 2015 capaian efisiensi sudah baik karena dalam pendapatan lebih banyak daripada pengeluaran yang dikeluarkan untuk mengelola wisata Curug Sewu.

Kolam renang boja

Kolam renang yang selalu berbenah dan berkembang ini mempunyai dua buah kolam Yaitu kolam renang prestasi untuk atlit dan kolam renang rekreasi untuk anak-anak. Kolam renang prestasi yang tersedia disini memiliki kedalaman kurang lebih 2 meter, panjang 50 meter serta lebar 20 meter. saat ini merupakan kolam renang terbesar di Kabupaten Kendal, sehingga keberadaannya sering digunakan sebagai tempat penyelenggaraan perlombaan cabang renang dan olahraga air lainnya. Yang dimaksud dengan kolam renang prestasi ada dimana kolam renang untuk

dewasa, sedangkan untuk kolam renang rekreasi adalah kolam renang untuk anak.

Berbagai wahana permainan berbagai macam seperti seluncur air, ember tumpah, three in one, serta semburan air mancur dari ketinggian 5 meter siap memanjakan pengunjung yang sedang bermain air dikolam renang rekreasi. Disediakan pula puluhan gasebo cantik bagi para pengunjung yang ingin duduk dan bersantai untuk menikmati keindahan daya tarik wisata. Mushola, toilet, ruang ganti baju, dan semua itu bisa dinikmati/ dimanfaatkan secara gratis bagi pengunjung yang sudah membayar tiket masuk.

Efektivitas

Capaian target efektivitas retribusi pariwisata ditahun 2013 target yang ditentukan untuk Kolam Renang Boja itu Rp.167.921.000 realisasi pendapatan yang dicapai sebesar Rp.143.745.000 (85,60%) dan kemudian ditahun 2014 target yang ditentukan itu masih sama Rp.167.921.000 realisasi pendapatan yang dicapai sebesar Rp.151.950.000 (90,49%) meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya, kemudian ditahun 2015 target yang ditentukan yaitu menjadi turun Rp.150.000.000 realisasi pendapatan yang dicapai sebesar Rp.226.367.000 (151,03%) terjadi peningkatan ditahun ini, selanjutnya untuk tahun 2016 target yang ditentukan menjadi yaitu Rp.256,400,000 realisasi pendapatan yang dicapai sebesar Rp.333,002,000 (131.31%) meningkat cukup pesat. Kesimpulan dalam perkembangan efektivitas, karena pada tahun 2015 dan 2016 lebih baik daripada tahun

sebelumnya yaitu tahun 2013 dan 2014

Efesiensi

Capaian efesiensi yang ada diwisata Kolam Renang Boja. Ditahun 2013 pendapatan yang diperoleh Rp.143.745.000, pengeluaran anggaran tidak ada tidak mendapat anggaran. Untuk tahun 2014 pendapatan yang diperoleh Rp. 151.950.000, pengeluaran anggaran Rp. 190.350.000 tidak efisien karena pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Untuk tahun 2015 pendapatan yang diperoleh Rp. 226.367.000, pengeluaran anggaran Rp. 59.000.000 sangat efisien karena pendapatan lebih besar dari pada pengeluaran anggaran. Kesimpulan terdapat perkembangan efesiensi, karena pada tahun 2015 lebih baik daripada tahun sebelumnya yaitu tahun 2014.

2. Faktor-faktor penghambat atau kendala yang dihadapi sektor pariwisata di Kabupaten Kendal.

a. Sumberdaya

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia

yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan retribusi pariwisata terjadi pada sumberdaya manusia. Melihat dari segi kualitas dan kuantitasnya cukup kurang. Untuk kualitas dapat dilihat dari pendidikan terakhir yang ditempuh dalam setiap pelaksana kebijakan yang ada dilapangan/ pelaksana teknis. Rata-rata pendidikan yang ditempuh ada SMA kebawah . Untuk kuantitasnya dan kualitas itu kurang karena diwisata Sendang Sekucing ada 9 orang diantaranya 2 orang S1, kemudian 5 orang SMA, dan 2 orang SMP. Kemudian diwisata Curug Sewu 1 orang S1, SMA/SLTA 21 orang , kemudian SMP/SLTP 4 orang .

b. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor dari keberhasilan atau tidak berhasil suatu pelaksanaan kebijakan retribusi pariwisata saat ini. Ketidak jelasan struktur birokrasi ini akan menghambat jalannya suatu kebijakan yang ditetapkan. Birokrasi sebagai pelaksana dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang telah diberikan wewenang melalui keputusan politik harus dapat menempatkan posisinya dengan

jalan koordinasi yang baik. Yang menajdi kendala saat ini adalah diteknis lapangan, dimana untuk struktur birokrasi yang ada dilapangan itu tidak ada. Para pegawai disana bekerja berdasarkan kemauan keras sehingga pekerjaan yang dimiliki tidak menentu yang mengakibatkan penumpukan pekerjaan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kebijakan retribusi tempat rekreasi adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan fasilitas tempat rekreasi, untuk meningkatkan ketertiban dikawasan pariwisata pada umumnya dan ketertiban pengunjung pada khususnya serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah disektor retribusi daerah. Pemungutan retribusi memasuki kawasan tempat rekreasi merupakan salah satu dari beberapa jenis pemungutan retribusi yang ada di Pemerintah Kabupaten Kendal. Kebijakan retribusi pariwisata saat ini dalam meningkatkan fasilitas pelayanan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan terlebih di tahun 2013,2014, 2015 dan 2016, di tahun 2016 pemerintah Kabupaten Kendal secara keseluruhan daya tarik wisata yang di kelola oleh pemerintah daerah.

Dilihat dari segi efektivitas perkembangan tiap tahun sudah baik untuk keseluruhan. Persentase dari pendapatan yang ditunjukan juga sudah bagus. Akan tetapi tidak diimbangi dengan kekuatan finansial yang mendukung kemajuan daya tari wisata yang ada di Kabupaten Kendal.

Dari segi efisiensi tarif retribusi yang ditetapkan sudah sesuai dengan masyarakat dalam arti mampu dijangkau kalangan manapun, dan terkait dengan efisiensi ini beberapa wisata tidak efisien karena tidak sebandingnya antara pendapatan dan pengeluaran. Dimana untuk beberapa wisata ada pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh wisata tersebut, akan tetapi untuk keseluruhan destinasi wisata di Kabupaten Kendal sudah efisien karena dengan keseluruhan pendapatan lebih besar daripada pengeluaran yang dikeluarkan untuk mengelola ketiga destinasi wisata tersebut.

Hambatan atau faktor kendala yang dihadapi oleh sektor pariwisata yang terjadi dalam kajian perkembangan retribusi pariwisata dilapangan adalah kurangnya fasilitas pendukung sarana dan prasarana yang tidak berkembang karena masalah finansial atau anggaran yang kecil dan sumberdaya yang kurang dalam kriteria baik itu dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya. Dari segi pendidikan yang menengah kebawah itu menunjukkan kualitas sumberdaya manusia yang ada dilapang kurang dan untuk kuantitas beberapa wisata untuk jumlah pegawai juga kurang.

B. SARAN

Untuk efektivitas sudah bagus dan perlu ditingkatkan lagi, karena terkait dengan retribusi pariwisata yang harus ada kontribusi dari sektor pariwisata dalam meningkatkan PAD, sehingga daerah Kabupaten Kendal tidak tertinggal dan tidak menempati peringkat 18 provinsi jawa tengah dan menjadi

daerah menarik maju akan keindahan dari wisata yang di munculkan dalam daerah Kabupaten Kendal tersebut.

Untuk efisiensi memerlukan manajemen yang bagus dalam mengembangkan atau memajukan suatu wisata yang menjadi kontribusi dalam kemajuan suatu daerah. Beberapa wisata harus mendapatkan perhatian yang khusus untuk mendapatkan anggaran. Melihat dari wisata Sendang Sekucing dan Kolam Renang Boja untuk tiga tahun terakhir ada yang tidak mendapatkan anggaran, saran saya adalah pemerintah harus membagi rata agar ketiga destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah mendapatkan anggaran yang di inginkan dalam memajukan suatu daya tarik wisata tersebut.

Sumber daya terkait dengan sumber daya manusia agar dapat ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas agar pada proses pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pariwisata dapat maksimal dilaksanakan. Perlu adanya penambahan sumberdaya diwisata kolam renang boja dan pantai sendang sekucing agar tidak terjadi kecelakaan lagi yang di alami oleh masyarakat atau pengunjung.

DAFTAR PUSTAKA

- H.B. Sutopo. 2006. Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Kencana, Inu Syafii. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta

Winarno, Budi.2007.Kebijakan Publik Teori dan proses. Yogyakarta: Mediapressindo

Darwin,MBP.2010.Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media

Nugroho,Riant.2004.Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta:PT Elex Media Komputindo

Indiahono,Dwiyanto.2009.Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis.

Yogyakarta:Gaya Media

Sugandi , yogi suprayogi. 2011. Administasi publik kosep dan perkembangan di Indonesia.Yogyakarta: graha ilmu

Regulasi :

Peraturan bupati Kendal provinsi jawa tengah nomor 61 tahun 2015

peraturan daerah kabupaten Kendal nomor 10 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha di Kabupaten Kendal dan termuat pada Bab VII tentang “retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah.UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Sumber lain :

<http://www.goodreads.com/book/show/6324564-evaluasi-kebijakan-publik>

<https://muhammadong.wordpress.com/2012/07/10/evaluasi-kebijakan-publik/>

Jurnal :

Saputro, Amin sapto (2014) “*evaluasi pengembangan obyek wisata di kabupaten banyumas dalam meningkatkan pendapatan asli daerah*”. Yogyakarta tahun *ejournal.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8922/17-desember.pdf* Dikutip tanggal 28 Juni2016

Sari, Nur Indah Kurnia, (2015), “*Peranan Retribusi Obyek Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Kasus Pada Wisata Religi Makam Sunan Giri di Kabupaten Gresik)*”,*ejournal.unesa.ac.id/article/13671/57/article.pdf* Dikutip tanggal 12 Mei 2016

Dahlan, M.Syaiful (2015) “*Evaluasi Pelaksanaan Strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Wisata Bahari Pada Daerah Tertinggal di Kabupaten PesisirBarat*”<https://unila.ac.id/23646/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> Dikutip tanggal 28 januari 2017.